

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aedy, Hasan dan Mahmudin, 2017, *Metodologi Penelitian (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyono, Ma'ruf, 2017. *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Cahyono, Ma'ruf. 2018, *Pertanggung Jawaban Kepala Pemerintahan Dalam Preferensi Sistem Pemerintahan Di Beberapa Negara*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Danil, Elwi. 2014. *Korupsi: Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmodiharjo, Darji. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat)*, Depok: Prenadamedia Group.
- Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti.
- Girsang, Juniver. 2012. *Abuse Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : JG Publishing.
- Hatta, Muhammad. 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi T, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

- Kadir, Adies. 2018. *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*, Jakarta: MerdekaBook.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lubis, Fauziah. 2020. *Advokat VS Pencuci Uang*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, cetakan ke-1*, Jakarta: PT Kencana.
- Mertokusumo. Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Miharja, Marjan. 2020. *Korupsi, Integritas & Hukum : Tantangan Regulasi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Mudjia. 2011. *Fungsi Teori dan State of the Arts dalam Penelitian*, Malang: (BahanAjar Kuliah Program Magister dan Doktor).
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Rasjidi , Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017
- Ruslan, Rosadi. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny wignosoebroto. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan ke-5*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suteksi. et.al. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Strong, C.F. 2015. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk (terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- Syauket, Amalia. 2020. *Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Tim SPORA, *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantas Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputihan Bidang Pencegahan.
- Waluyo , Bambang. 2014. *Pidana dan Pemidanaan (Cetakan ke-4)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yamin, Moh. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung: PT Rosdakarya Offset.
- Wignojoebroto, Soetandyo.2002. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Ifdal Kasimm et.al.

B. Ensiklopedia:

- David Miller. 2017. "Justice" dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford: Metaphysics Research Lab.

C. Internet:

- Andriansyah , Anugrah. "Pemberian Grasi untuk Bekas Gubernur Riau Dikritik" ,<https://www.voaindonesia.com/a/pemberian-grasi-untuk-bekas-gubernur-riau-dikritik-/5182995.html>, 22 Mei 2021.
- Azanella, Luthfia Ayu . "*Banyak Dikritik, Ini Penjelasan Presiden atas Grasi bagi Annas Maamun*", <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/28/060000865/banyak-dikritik-ini-penjelasan-presiden-atas-grasi-bagi-annas-maamun?page=all>., 19 Mei 2021.
- Budhiman, Ilham . "*Usia dan Masalah Kesehatan Jadi Alasan Annas Maamun Mengajukan Grasi ke Presiden Jokowi*", <https://kabar24.bisnis.com/read/20191126/16/1174680/usia-dan-masalah-kesehatan-jadi-alasan-annas-maamun-mengajukan-grasi-ke-presiden-jokowi>. 18 Mei 2021.

- Elnizar , Norman Edwin. “*Apa Bedanya 4 Hak ‘Sakti’ Presiden: Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi?*”.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d35b324e8328/apa-bedanya-4-hak-sakti-presiden--amnesti--abolisi--grasi--dan-rehabilitasi/>. 6 November 2020.
- Harjanto, Setyo Aji. "51 Pegawai KPK Dipecat, Berikut 8 Kesimpulan Penting ICW", <https://kabar24.bisnis.com/read/20210526/16/1398109/51-pegawai-kpk-dipecat-berikut-8-kesimpulan-penting-icw>, 29 Mei 2021.
- Hidayat, Rofiq. ” Pemberian Grasi untuk Annas Maamun Menuai Kritik”,
<https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddfed8a2859d/pemberian-grasi-untuk-annas-maamun-menuai-kritik?page=all>, 20 mei 2021.
- Jakson, Rolas. “Korupsi Merupakan Tindak Extra Ordinary Crime”,
<https://www.kompasiana.com/www.rolastampubolon.wordpress.com/552c09f76ea8341e2f8b4581/korupsi-merupakan-extra-ordinary-crime>,. 16 Desember 2020, pukul 10.00.
- Nabila, Fahira. “Ini Kriteria Narapidana yang Berhak Dapat Pembebasan Bersyarat”, <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/23/ini-kriteria-narapidana-pembebasan-bersyarat/> . 6 November 2020.
- M Purwadi. “*Puskapum: Grasi Jokowi Preseden Buruk bagi Pemberantasan Korupsi*”, <https://nasional.sindonews.com/berita/1463405/13/puskapum-grasi-jokowi-preseden-buruk-bagi-pemberantasan-korupsi>, 21 Mei 2021.
- Putra, Putu merta. “*Alasan Jokowi Berikan Grasi kepada Eks Gubernur Riau Annas Maamun*”, <https://www.liputan6.com/news/read/4120198/alasan-jokowi-berikan-grasi-kepada-eks-gubernur-riau-annas-maamun>, 21 Mei 2021.
- Rastika, Icha. "*Grasi Presiden Jokowi kepada Annas Maamun yang Menuai Kritik...*", <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/06305881/grasi-presiden-jokowi-kepada-annas-maamun-yang-menuai-kritik?page=all>, 18 Mei 2021.
- Ramadhan, Ardito. “*Grasi Presiden Jokowi kepada Annas Maamun yang Menuai Kritik...*”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/06305881/grasi>

[presiden-jokowi-kepada-annas-maamun-yang-menuai-kritik?page=all](https://www.wartaekonomi.co.id/read258538/kpk-kaget-kok-annas-maamun-dikasih-grasi-oleh-presiden). 7
November 2020.

Redaksi WE Online. “KPK Kaget Kok Annas Maamun Dikasih Grasi oleh Presiden”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read258538/kpk-kaget-kok-annas-maamun-dikasih-grasi-oleh-preside>. 21 Mei 2021.

D. Jurnal:

Bassang, Tommy J. “Pelaksanaan Pelaku Tindak Pidana”, Lex Crimen, vol. IV/No.5/Juli/2015. 2015.

Dinnear, Dientia. “Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden”. (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus Di Indonesia), 2013.

Irfani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, Al’Adl, Vol.IX/No.3/2017.

Kurniawan, Chandra. ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Terpidana Dalam Pemberian Grasi’, Lex Administratum, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015.

Sunaryo. “Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme,” PPE-Unika Atma Jaya Jakarta Vol. 23 No. 21. 2018.

Sutiyoso, Bambang. “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”. Jurnal Hukum No. 2/ Vol. 17/2010.

Susanto, Anton F.. “Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif),”. Jurnal Keadilan Sosial, Edisi 1. 2010.

E. Majalah:

Komisi Pemberantas Korupsi. 2019. “Integrito (Empat Tahun Kami Menghimpun), Edisi Khusus.” Jakarta: Pusat Edukasi Antikorupsi.

F. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PERMENKUMHAM Nomor 49 Tahun 2016,

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

